

PERSEPSI DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DESA TABO-TABO TERHADAP PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KAWASAN HUTAN

PERCEPTION AND PARTICIPATION OF PEOPLE TABO-TABO VILLAGE ON PEOPLE EMPOWERMENT PROGRAM IN FOREST AREA

*Muhammad Yasir Arafat⁽¹⁾
Email: yasir.uit.2012@gmail.com*

Program Studi Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Indonesia Timur Makassar, Indonesia⁽¹⁾

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mendeskripsikan persepsi dan partisipasi masyarakat dalam program pemberdayaan masyarakat, (2) mendeskripsikan masalah yang dihadapi oleh Kawasan Hutan untuk Tujuan Khusus (KHDTK) dan masyarakat terhadap program pemberdayaan, (3) mendeskripsikan keberadaan hubungan antara kondisi ekonomi sosial dengan persepsi dan partisipasi, (4) menggambarkan peran sosial pengelolaan hutan edukasi dan pelatihan dalam Program Pemberdayaan Masyarakat dan (5) menggambarkan harapan masyarakat tentang pendidikan dan pelatihan hutan. Penelitian ini dilakukan di KHDTK Tabo-Tabo Kabupaten Pangkep dengan menggunakan metode deskripsi kualitatif dan kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program pemberdayaan masyarakat termasuk dalam kategori sedang. Faktor sosial ekonomi tidak mempengaruhi persepsi masyarakat tentang program pemberdayaan yang diselenggarakan oleh Balai DIKLAT Kehutanan (BDK). Peran sosial BDK pada penduduk desa Tabo-Tabo adalah sebagai pendidik dan perantara. Masalah masyarakat pada People Empowerment Program adalah tidak adanya tindak lanjut atas Program Pemberdayaan Rakyat yang telah dilakukan. Masalah BDK pada Program Pemberdayaan Masyarakat adalah kurangnya dana dan pola pikir pasif masyarakat. Harapan masyarakat terhadap BDK adalah melestarikan Pendidikan dan Hutan Traing, staf BDK harus berhenti memberikan rasa takut kepada masyarakat, pembangunan jalan menuju desa hulu harus dilanjutkan, dan air terjun di Hutan Pendidikan dan Pelatihan harus dikembangkan untuk tujuan pariwisata.

Kata kunci: Tabo-tabo, pemberdayaan, masyarakat, hutan

ABSTRACT

This study aims to : (1) describe the people's Perception and Participation on People Empowerment Program, (2) describe problems faced by both KHDTK and people toward the empowerment program, (3) describe the existence of relationship among social economy condition with perception and participation, (4) describe social role of management of The Education and Training Forest in people Empowerment Program and (5) describe people's expectations on Education and Training Forest. This study is conducted in Forest Area for Special Purpose (KHDTK) Tabo-Tabo in Bungoro District of Pangkep Regency in March 2010 by using quantitative and qualitative description method. The result indicates that the people empowerment program is in moderate category. Social economy factor doesn't influence the people's perception on Empowerment Program which held by BDK. The social role of BDK on Tabo-Tabo villagers are as educator and broker. People's problem on People Empowerment Program is the absence of follow-up action on People Empowerment Program that has been done. BDK's problem on People Empowerment Program are lack of fund and people's passive mindset. People's expectation towards BDK are preserving The Education and Traing Forest, BDK staff should stop giving scare the people, the road construction toward upper village should be continued, and waterfall in The Education and Training Forest should be developed for tourism purpose.

Keywords: Tabo-tabo, empowerment, community, forest.

PENDAHULUAN

Pemberdayaan masyarakat pada dasarnya merupakan upaya bagaimana masyarakat itu dapat mengenal dan merefleksikan permasalahannya sendiri, potensi diri, dan lingkungannya serta memotivasi dalam mengembangkan potensi tersebut secara proporsional dengan cara partisipatif (Hikmat, H. 2001; Adi, 2003).

Pemberdayaan masyarakat di Indonesia sudah dimulai sejak lama yang implementasinya dalam bentuk penghijauan, reboisasi dan rehabilitasi lahan kritis diberbagai DAS sejak tahun 1970-an. Semua program tersebut dimaksudkan supaya nilai-nilai pengelolaan hutan dan lahan dapat melembaga dimasyarakat. Dari segi keproyekan sudah ribuan ha lahan yang sudah direboisasi, dihijaukan dan direhabilitasi.

Demikian juga pembinaan masyarakat, sudah ribuan orang dilatih dan disuluhkan nilai-nilai pengelolaan hutan dan lahan. Namun demikian isu dan permasalahan yang berkaitan dengan kelestarian hutan dan lahan masih saja menjadi isu atau problematik yang menarik untuk dibicarakan dan memerlukan penanganan tersendiri (Hikmat, H. 2001). Pada hakekatnya pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses perubahan perilaku masyarakat sebagai pusat perhatian

sekaligus dipandang dan diposisikan sebagai subyek bagi dirinya sendiri dalam proses pembangunan.

Dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.39/Menhut-II/2013 menerangkan bahwa pemberdayaan masyarakat setempat melalui Kemitraan Kehutanan adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat setempat untuk mendapatkan manfaat sumber daya hutan secara optimal dan adil melalui Kemitraan Kehutanan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat. Masyarakat setempat adalah kesatuan sosial yang terdiri dari warga negara Republik Indonesia yang tinggal di dalam dan/atau di sekitar hutan, yang bermukim di dalam dan di sekitar kawasan hutan yang memiliki komunitas sosial dengan kesamaan mata pencaharian yang bergantung pada hutan dan aktivitasnya dapat berpengaruh terhadap ekosistem hutan.

Pemberdayaan masyarakat dalam sudut pandang yang lain dapat ditafsirkan sebagai strategi pilihan dalam konteks pembangunan alternatif. Munculnya konsep pembangunan alternatif dalam diskursus pembangunan sebagai reaksi terhadap kelemahan model pembangunan konvensional (pro pertumbuhan ekonomi) dalam mengatasi problem kemiskinan, menjagakelestarian lingkungan serta

memecahkan aneka problem sosial yang menghimpit masyarakat (Zubaedi, 2007).

Menurut Hairiah, *et al.* (2003), hutan kemasyarakatan adalah hutan yang perencanaan, pembangunan, pengelolaan, dan pemungutan hasil hutan serta pemasarannya dilakukan sendiri oleh masyarakat yang tinggal di sekitar hutan. Pengertian tersebut, memberikan pandangan tentang pengakuan dan pemberian hak kelola lahan hutan atau lahan adat oleh pemerintah kepada masyarakat lokal atau masyarakat adat serta pentingnya meningkatkan perekonomian masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan dengan tetap menjaga kelestarian fungsi hutan.

Dalam rangka pemberdayaan masyarakat sekitar hutan perlu juga dilakukan pemetaan terhadap permasalahan dan harapan mereka terhadap hutan dimana mereka tinggal. Hutan pendidikan dan latihan Tabo-Tabo merupakan hutan di bawah naungan departemen kehutanan dalam hal ini Balai DIKLAT Kehutanan Makassar. Hutan dengan luas 601,26 ha ini berbatasan langsung dengan beberapa desa, salah satunya adalah desa Tabo-Tabo. Hutan pendidikan dan latihan Tabo-Tabo ini tidak bisa lepas dari SK menteri kehutanan nomor 456/Menhut-VII/2004 tanggal 29 Nopember 2004 dimana di dalam SK tersebut ditetapkan lima program prioritas Departemen Kehutanan mulai dari

tahun 2004 sampai tahun 2009, salah satu program prioritas tersebut adalah Pemberdayaan ekonomi masyarakat di dalam dan di sekitar hutan, dan di sekitar kawasan hutan.

Hutan DIKLAT Tabo-Tabo secara geografis terletak pada 4°43'35" - 4°45'18" LS dan 119°38'50" dan 119°41'06" BT. Kawasan hutan DIKLAT Tabo-Tabo dikelola oleh Balai Pendidikan dan Latihan Kehutanan Makassar (BDK Makassar). Berdasarkan keputusan menteri nomor: 6173/KPTS-II/2002 tentang organisasi dan tata kerja balai pendidikan dan pelatihan kehutanan (BDK) visi pengembangan pengelolaan kawasan hutan DIKLAT Tabo-Tabo dalam rangka optimalisasi pemanfaatan adalah "Menjadikan kawasan hutan DIKLAT Tabo-Tabo berfungsi ganda yaitu menunjang/mendukung Pendidikan dan Latihan (DIKLAT) kehutanan dan sumber kehidupan masyarakat sekitar hutan

Salah satu Misi yang diemban dalam rangka pengembangan pengelolaan kawasan hutan DIKLAT Tabo-Tabo adalah meningkatkan peran kawasan Hutan DIKLAT Tabo-Tabo dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar hutan.

Dalam rangka pemberdayaan masyarakat sekitar hutan, pihak pengelola hutan DIKLAT Tabo-Tabo melakukan beberapa kegiatan seperti, Pengembangan desa sebagai desa binaan untuk mendukung kegiatan DIKLAT, pembinaan masyarakat

melalui Kelompok Tani Hutan, kegiatan pendampingan, Pendidikan dan Pelatihan (DIKLAT), kegiatan penyuluhan dalam rangka meningkatkan pengetahuan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat bukan hanya pelaksanaan program yang melibatkan masyarakat, tetapi bagaimana sebuah program mampu meningkatkan posisi tawar masyarakat, bagaimana sebuah program bisa meningkatkan potensi masyarakat atau apakah sebuah program pemberdayaan masyarakat sudah tepat sasaran (Suharto, 2005; Sulistiyan, 2004).

Berdasarkan uraian diatas maka perlu dilakukan kajian terhadap program pemberdayaan masyarakat pihak pengelola hutan pendidikan dan latihan Tabo-Tabo dalam hal ini mengetahui persepsi dan partisipasi masyarakat desa Tabo-Tabo terhadap program pemberdayaan masyarakat oleh pihak pengelola hutan pendidikan dan latihan Tabo-Tabo.

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini berlangsung mulai dari awal hingga akhir Maret 2015 Penelitian ini dilaksanakan di Desa Tabo-Tabo, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep.

B. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat yang pernah terlibat dalam program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan pihak BDK. Sampel dari

populasi yang akan diteliti ditentukan secara purposive sebanyak 35 orang.

C. Teknik Pengumpulan Data dan Jenis Data

Data yang diperoleh pada penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui pengamatan lapang. Pengamatan lapang dilakukan terhadap berbagai aktivitas di dalam areal Hutan Pendidikan dan latihan Tabo-Tabo menyangkut kegiatan usaha tani maupun pemungutan hasil hutan. Sedangkan wawancara dilakukan secara terstruktur dengan menggunakan daftar pertanyaan (kuisisioner) yang telah disiapkan menyangkut persepsi dan partisipasi masyarakat terhadap program pemberdayaan, kendala BDK dalam program pemberdayaan, harapan masyarakat terhadap program pemberdayaan serta peran sosial (Balai DIKLAT Kehutanan) BDK dalam program pemberdayaan.

Data sekunder diperoleh melalui studi pustaka hasil-hasil penelitian sebelumnya, dari kelurahan/desa, instansi atau lembaga yang terkait dengan penelitian menyangkut keadaan umum lokasi penelitian, keadaan umum KHDTK Tabo-Tabo

D. Analisis Data

Untuk menganalisa tingkat persepsi dan partisipasi dalam program

pemberdayaan masyarakat KHDTK Tabo-Tabo digunakan skala likert yang digolongkan berdasarkan kategori rendah, sedang dan tinggi.

Untuk mengetahui tingkat persepsi dan partisipasi masyarakat secara umum dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat digunakan rumus :

$$UP = \frac{\sum X_{ij} (ya)}{NS} \times 100\%$$

UP: Ukuran Persepsi dan Partisipasi Masyarakat

X_{ij}: Jumlah nilai yang menjawab ya pertanyaan ke-i dan responden ke-j

NS: Nilai sebenarnya/Seharusnya dari jawaban responden

Selanjutnya nilai UP didefinisikan dengan menggunakan pendekatan kategori yang dikembangkan oleh Babble (1991) dalam Fatoni (2004) yang telah dimodifikasi sebagai berikut :

- Nilai UP > 66,68 %: Persepsi dan Partisipasi Tinggi
- Nilai UP 33,34 % - 66,67 %: Partisipasi sedang
- Nilai UP < 33,33 %: Persepsi dan Partisipasi Rendah

Untuk menganalisa hubungan sosial ekonomi masyarakat dengan persepsi dan tingkat partisipasinya terhadap program pemberdayaan masyarakat KHDTK Tabo-Tabo maka digunakan uji Chi Square dengan rumus :

$$X^2 = \sum_{i=1}^B \sum_{j=1}^K \frac{BK (O_{ij} - E_{ij})^2}{E_{ij}}$$

X² = Uji Chi Square

B = Taraf atau tingkatan yang terjadi pada taraf i

K = Taraf atau tingkatan

J = Banyaknya pengamatan yang terjadi pada taraf j

E_{ij} = (n_{oj} x n_{ij}) / n

n_{ij} = Jumlah baris i

n_{oj} = Jumlah baris j

n_{ij} = Pernyataan kolom j

a = Pernyataan dari i = 1 dan j = 1

Jika X² hitung lebih besar dari X² tabel (1 -) (B-1) (K-1) dalam taraf nyata 95 % dan derajat bebas (db) untuk distribusi Chi Square maka variabel bebas dan tak bebas mempunyai hubungan satu sama lain. Analisis deskriptif dilakukan terhadap kendala dan harapan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Persepsi Masyarakat Tentang Pentingnya Keberadaan Hutan DIKLATTabo-Tabo

Persepsi masyarakat terhadap hutan DIKLAT dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap hutan DIKLAT tinggi. Hal ini disebabkan karena mereka merasakan manfaat setelah kawasan hutan di Desa Tabo-Tabo di kelola oleh pihak hutan DIKLAT seperti tidak

terjadinya kekurangan air dimusim kemarau.

Tabel 1. Persepsi Masyarakat Tentang Pentingnya Keberadaan Hutan DIKLAT Tabo-Tabo

No	Pernyataan	Persepsi			Respon
		S	Ragu	TS	Jml
1	Pentingnya keberadaan hutan DIKLAT Tabo-Tabo	35	0	0	35
2	Keberadaan hutan DIKLAT Tabo-Tabo telah memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar	30	2	3	35
3	Keberadaan hutan DIKLAT Tabo-Tabo telah meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar	23	5	7	35
4	Keberadaan hutan DIKLAT Tabo-Tabo perlu dijaga dan dilestarikan	32	3	0	35

Sumber: Data Primer Diolah, 2015

2. Persepsi Masyarakat Desa Tabo-Tabo Terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat oleh Pengelola Hutan DIKLAT Tabo-Tabo

Persepsi masyarakat terhadap program pemberdayaan dapat diketahui

dengan melihat sikap mereka terhadap tiga pernyataan yang diajukan kepada mereka. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2 berikut ini.

Tabel 2. Persepsi Masyarakat Terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat Oleh Pihak Pengelola Hutan DIKLAT

No	Pernyataan	Persepsi			Rspnden
		S	RR	TS	Jml
1.	Kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan selama ini memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar	29	3	3	35
2.	Kegiatan pemberdayaan masyarakat telah mengakomodir keinginan dan harapan masyarakat	21	9	5	35
3.	Kegiatan pemberdayaan masyarakat selama ini memiliki beberapa kendala dan permasalahan	22	0	13	35
4	Keberadaan hutan DIKLAT Tabo-Tabo perlu dijaga dan dilestarikan	32	3	0	35

Sumber: Data Primer Diolah, 2015

3. Permasalahan-Permasalahan Program Pemberdayaan Masyarakat

Berikut di bawah ini akan dijelaskan mengenai permasalahan dan kendala yang

dihadapi baik dari pihak pengelola hutan DIKLAT maupun dari masyarakat.

A. Permasalahan yang dihadapi oleh Pihak Pengelola Hutan DIKLAT

Permasalahan yang dihadapi selama ini di dalam program pemberdayaan masyarakat adalah pola pikir masyarakat yang masih senang “diberi”, tidak ada kesediaan untuk mengorbankan waktu dan menerapkan pelatihan yang telah diberikan.

Masalah kedua yang dihadapi pihak BDK adalah masih banyaknya masyarakat masih berpandangan negatif terhadap BDK, sehingga menurut pihak pengelola ini menyulitkan mereka di dalam program pemberdayaan masyarakat. Misalnya saja masyarakat mungkin masyarakat tidak terlalu serius di dalam mengikuti program pemberdayaan masyarakat yang diberikan BDK.

Masalah berikutnya adalah masalah keterbatasan dana, dana yang ada selama ini hanya untuk melakukan kegiatan pelatihan. Dana tersebut belum cukup untuk mengadakan kegiatan pendampingan dan pembinaan kepada masyarakat terkait pelatihan-pelatihan yang telah dilakukan.

B. Permasalahan yang dihadapi oleh Masyarakat

Permasalahan yang dihadapi masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat yang diberikan oleh pihak pengelola hutan DIKLAT Tabo-

Tabo selama ini adalah tidak adanya kelanjutan dari program tersebut.

Permasalahan kedua yang dihadapi masyarakat adalah tidak meratanya peserta yang ikut di dalam pelatihan-pelatihan yang diberikan, dimana ada warga yang sudah berulang kali mengikuti pelatihan sedangkan masih banyak warga yang belum sama sekali ikut.

Permasalahan berikutnya adalah permasalahan terhadap beberapa kegiatan pelatihan. Pelatihan budidaya rumput lebah madu menurut masyarakat masih kurang bagus, sebab yang budidaya lebah yang diajarkan adalah budidaya jenis *Apis Cerana* dimana lebah jenis ini sedikit menghasilkan madu jika dibandingkan dengan jenis lebah hutan (*Apis Dorsata*).

4. Harapan-Harapan Masyarakat Terhadap Hutan DIKLAT Tabo-Tabo

Harapan masyarakat Desa Tabo-Tabo terhadap Hutan DIKLAT adalah sebagai berikut :

A. Hutan DIKLAT Tetap Dipertahankan Keberadaannya

Mayoritas masyarakat yang mempunyai harapan demikian adalah masyarakat yang tinggalnya agak jauh dengan hutan DIKLAT adapun masyarakat yang tinggal di dekat hutan mereka saat ini bersengketa dengan pihak hutan DIKLAT dalam hal kepemilikan lahan Hutan DIKLAT Tabo-Tabo. Sebenarnya

masyarakat menyadari akan fungsi tata air dari hutan DIKLAT Tabo-Tabo baik bagi masyarakat yang tinggalnya jauh maupun dekat dengan hutan DIKLAT, baik mereka yang bersengketa maupun tidak kepada hutan DIKLAT. Tetapi ketika masyarakat ditanyakan harapan mereka terhadap hutan DIKLAT, maka masyarakat yang dekat dengan hutan DIKLAT baik itu yang berkonflik maupun yang tidak berkonflik dengan pihak BDK berharap agar konflik masyarakat dengan BDK dapat diselesaikan. Adapun masyarakat yang tinggalnya agak jauh dari hutan DIKLAT mayoritas berharap agar hutan DIKLAT dipertahankan keberadaannya.

B. Petugas BDK Jangan Menakut-Nakuti Masyarakat

Beberapa responden yang menganggap petugas BDK terlalu arogan dan sering menakut-nakuti masyarakat. Sebagaimana penuturan salah seorang responden “Kalau petugas datang sosialisasi kepada kita, selalu mengatakan kalau menebang pohon di hutan sanksinya sekian, sebenarnya masyarakat tidak perlu hal seperti itu, sebaiknya mereka disadarkan tentang fungsi dan manfaat hutan, masyarakat seharusnya dirangkul bukan ditakut-takuti”

C. Konflik Antara Masyarakat Dengan BDK Dapat Diselesaikan

Telah terjadi konflik antara masyarakat sekitar hutan DIKLAT dengan

pihak pengelola hutan DIKLAT dalam hal kepemilikan lahan. Menurut masyarakat sawah yang ada di dalam hutan DIKLAT adalah milik mereka karena orang tua mereka telah mengelola sawah tersebut sebelum adanya BDK, begitupun wilayah hutan DIKLAT yang terdapat pohon jati adalah kebun mereka yang diklaim sebagai wilayah hutan DIKLAT.

Pada dasarnya masyarakat sekitar yang berkonflik dengan BDK menyadari akan pentingnya kehadiran hutan DIKLAT dan tetapi di sisi lain masyarakat berpandangan bahwa mereka juga punya hak untuk mempertahankan kehidupan mereka.

Di dalam wilayah hutan DIKLAT terdapat perkampungan yang di sebut kampung paniki dimana telah dibuat jalan untuk menuju kampung tersebut, namun pengerjaannya terhenti ketika jalan tersebut memasuki wilayah hutan DIKLAT. Masyarakat mengharapkan agar pembangunan jalan tersebut dilanjutkan pengerjaannya sebab masyarakat di kampung tersebut sangat terbatas dalam akses pendidikan dan transportasi.

Hutan DIKLAT Tabo-Tabo memiliki objek wisata air terjun dan saat ini juga digunakan sebagai tempat outbond. Masyarakat berharap agar pihak BDK mengembangkan tempat wisata yang mereka miliki dengan harapan masyarakat akan mendapatkan pekerjaan dan tambahan

penghasilan jikalau tempat wisata tersebut sudah ramai dikunjungi orang.

KESIMPULAN

1. Secara umum masyarakat Desa Tabo-Tabo mempunyai persepsi yang tinggi terhadap Hutan DIKLAT Tabo-Tabo, baik itu persepsi terhadap keberadaan hutan DIKLAT (85,71%) maupun persepsi terhadap program pemberdayaan masyarakat (57,14%).
2. Mayoritas masyarakat Desa Tabo-Tabo mempunyai tingkat partisipasi sedang (42,86%) di dalam mengikuti kegiatan pemberdayaan masyarakat.
3. Faktor Sosial Ekonomi tidak mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pihak BDK. Hanya faktor Tingkat pendidikan yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pihak BDK.
4. Peran sosial BDK terhadap masyarakat Desa Tabo-Tabo yaitu sebagai Pendidik (edukator) dan sebagai Perantara (broker).
5. Permasalahan masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan pihak BDK selama ini adalah tidak adanya tindak lanjut terhadap program pemberdayaan masyarakat yang selama ini diberikan. Permasalahan pihak BDK terhadap

program pemberdayaan masyarakat adalah keterbatasan dana dan pola pikir masyarakat yang masih ingin diberi.

6. Harapan-harapan masyarakat terhadap pihak BDK adalah agar Hutan DIKLAT tetap dipertahankan keberadaannya, petugas BDK jangan menakut-nakuti masyarakat, konflik antara masyarakat dengan BDK dapat diselesaikan, jalanan menuju perkampungan atas dilanjutkan Pembangunannya dan objek wisata air terjun di hutan DIKLAT dikembangkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, I.R. 2003. *Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat dan Intervensi Komunitas*. Lembaga Penerbit FEUI. Jakarta.
- Departemen Kehutanan, 2013 *Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.39/Menhut - Ii/2013 Tentang Pemberdayaan Masyarakat Setempat Melalui Kemitraan Kehutanan*. Jakarta.
- Fatoni. 2004. *Tingkat dan Manfaat Partisipasi dalam Program Pengembangan Kecamatan. Studi Kasus di Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala. Tesis (Tidak Dipublikasikan)*. Balai Penelitian dan Pengembangan Kehutanan Sulawesi. Makassar.
- Hairiah, K. et al. 2003. *Peran Agroforestry pada Skala Plot*. World Agroforestry Centre (ICRAF). Bogor.

Hikmat, H. 2001. *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*, Bandung: Humaniora Utama..

Suharto, Edi. 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Refika Aditama. Bandung.

Sulistiyani, A.T. 2004. *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Gaya Media. Yogyakarta.

Zubaedi, 2007. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan Ekonomi Desa*. FISIP Universitas Muhammadiyah Sidoarjo